

SEPUTAR AKTUARIS



PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA
(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)

31 Desember 2015
edisi 5

SEPATH KATA DARI KETUA PAI

Salam Aktuaris,

Kita berjumpa kembali pada edisi Seputar Aktuaris di penghujung tahun 2015. Seputar Aktuaris diterbitkan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) secara triwulanan dan merupakan salah satu media komunikasi yang digunakan oleh PAI dalam menyampaikan program dan informasi seputar profesi aktuaris bagi anggotanya.

Dunia Asuransi di Indonesia tetap menunjukkan kinerja positif di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015. Dan diharapkan akan terus menunjukkan optimismenya di tahun 2016 seiring dengan optimisme pasar dan semakin meningkatnya kesadaran serta kebutuhan masyarakat untuk memiliki proteksi. Sesuai dengan paket kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, OJK turut berperan serta dengan mengeluarkan beberapa Peraturan baru yang diharapkan dapat memberikan kejelasan atas peraturan sebelumnya dan juga peresmian online system sehubungan dengan Perizinan dan penilaian atas *Risk Based Supervision* yang diharapkan dapat mempercepat proses perizinan yang sudah berjalan saat ini. Profesi Aktuaris tidak hanya didukung oleh OJK, Kementerian Keuangan pun telah mengeluarkan regulasi dan melakukan publik hearing atas draft Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Aktuaris pada Oktober 2015.

Beberapa program yang sudah dijadwalkan PAI untuk diadakan pada tahun 2015 juga berjalan dengan sukses, seperti Ujian Profesi dan Program Perkuliahan singkat sehingga per akhir tahun 2015 sudah terdapat total 399 orang (FSAI dan ASAI) demi mendukung program 1000 Aktuaris yang dicanangkan oleh Pemerintah. Serta Workshop tentang *Writing Report & High Impact Presentation* yang diharapkan dapat menambah kualitas dari *soft skill* para Aktuaris.

Sharing ilmu di antara sesama Aktuaris perlu dilakukan, baik melalui website PAI (www.aktuaris.org), buletin Seputar Aktuaris maupun media lainnya. Karena itu para anggota diharapkan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam mengirimkan artikel atau tulisan lainnya yang dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas profesi Aktuaris.

Akhir kata, saya ucapkan selamat menikmati edisi terakhir Seputar Aktuaris di tahun 2015 ini.

Rianto Ahmadi Djojosugito, FSAI
Ketua

BERITA

- 2 Profil Pengurus
Didi Achdijat, FSAI
- 3 Kaleidoskop
- 4 Actuary Beyond Numbers
Budi Ramdani, FSAI
- 5 Jaminan Pensiun yang
Merisaukan

Sudahkah Anda...

- Mengikuti PAI melalui akun Twitter @AktuarisPAI dan Facebook Group Aktuaris Indonesia?
- Membaca SK tentang Analisis Asuransi Umum?
- Membaca SK tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Analisis Asuransi Umum?

PROFIL PENGURUS

Didi Achdijat, FSAI



Pada edisi kali ini *Seputar Aktuaris* berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Didi Achdijat, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) periode 2014 – 2017.

Selain aktif bekerja sebagai pengurus PAI, Bapak Didi juga menjabat sebagai Aktuaris Perusahaan Asuransi Jiwa Al-Amin dan beliau baru saja diangkat sebagai Komisaris AJB Bumiputera 1912. Di luar kegiatannya sebagai Aktuaris, beliau aktif menulis berbagai artikel dan juga menulis buku bersama dengan sang kakak. Beliau juga aktif terlibat dalam organisasi *Perludem* (Perkumpulan pengamat pemilu dan demokrasi). Hasil karya tulisannya antara lain berjudul; “Disproporsionalitas dan proporsionalitas alokasi kursi DPR” dan “Pemerintah bukan Negara.”

Berikut ini adalah rangkuman dari hasil wawancara singkat dengan beliau:

Bagaimana awalnya dapat terjun ke Dunia Aktuaris?

Setelah lulus dari jurusan matematika Institut Teknologi Bandung (ITB) di tahun 1978, awalnya saya bermaksud untuk mengajar sebagai dosen di Institut Teknologi Surabaya. Namun kemudian saya ditawarkan untuk berkerja sebagai tenaga Aktuaris di TASPEN (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri). Akhirnya saya bekerja di perusahaan tersebut selama 29 tahun, sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2007. TASPEN pula yang mengirim saya ke Filipina untuk mendapatkan gelar *Master of Mathematics* dengan fokus di bidang Aktuaris.

Sepulang dari Filipina, saya bersama dengan tiga teman aktuaris lainnya, yaitu Kasir Iskandar, Imam Basuki, dan Sapto, yang kemudian disusul oleh Indra C. Situmeang, berdiskusi mengenai ujian profesi Aktuaris yang akhirnya mulai dilaksanakan pada tahun 1985. Pada tahun 1991, PAI menjadi tuan rumah untuk *East Asian Actuarial Conference* yang dilaksanakan di Bali.

Apa pendapat Bapak, sebagai pengurus PAI, yang perlu pengurus lakukan demi kemajuan profesi Aktuaris di Indonesia?

PAI harus memiliki *job description* yang jelas untuk Aktuaris Perusahaan, bahkan bila perlu untuk Aktuaris dan Ajun Aktuaris. Sehingga saat kita melakukan *fit and proper test* terhadap seorang calon Aktuaris Perusahaan, ada acuan yang jelas dan seragam. Setiap Aktuaris Perusahaan perlu mengerti betul apa saja yang menjadi peran dan tanggung jawabnya sebagai Aktuaris Perusahaan.

Selain itu, berkiblat kepada Asosiasi Aktuaris lainnya, seperti contohnya di Singapore, organisasi yang kita miliki tidak boleh hanya berfungsi sebagai kantor sekretariat saja. Tetapi juga harus dapat menjadi tempat agar semua Aktuaris dapat saling mengenal dan berkomunikasi satu sama lain.

Pengamatan saya menunjukkan adanya persaingan antar Aktuaris, sehingga kurang ada rasa saling menghormati diantara Aktuaris. Oleh karena itu menurut saya perlu adanya perubahan budaya profesi. Keadaan itu menurut saya adalah karena adanya tekanan dan tuntutan dari pengguna jasa yang sering mempunyai ukuran penilaian sendiri terhadap para professional.

Setiap Aktuaris yang terpilih menjadi Pengurus harus memiliki komitmen bekerja untuk asosiasi. Tetapi hal ini sulit karena adanya alasan pekerjaan. Karena itu PAI perlu merekrut seorang *Executive Director*, untuk menjalankan roda organisasi.

Harapan saya adalah agar penggunaan kantor PAI yang sekarang berada di Tebet dapat dimaksimalkan untuk semua kegiatan Aktuaris, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, manajemen maupun administrasi.

Apa pendapat Bapak agar Aktuaris di Indonesia saat ini dapat berkompetisi dengan Aktuaris asing?

Semua Aktuaris harus memiliki *common ground of knowledge* yang sama, yaitu tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan di bidang matematika atau statistik, tetapi juga mengerti ilmu *Finance, Investment* dan *Accounting*. Pengetahuan di bidang teknologi informasi juga perlu karena sebagai Aktuaris harus tahu manajemen sistem informasi data yang digunakan sebagai sumber informasi untuk valuasi aktuaris telah sesuai.

Selain itu, kita harus memiliki kebanggaan sebagai Aktuaris sehingga dapat terus termotivasi untuk meningkatkan diri agar dapat dihargai oleh profesi lainnya. Saya sering menggunakan semboyan “usia kita adalah sama, yang berbeda hanyalah tanggal lahir”. Semboyan ini bermaksud untuk memacu para professional untuk terus belajar, berkembang meningkatkan mutu tanpa mengenal batasan usia.

KALEIDOSKOP 2015

Berikut kegiatan PAI yang terekam dalam lensa selama tahun 2015



Kegiatan rutin: Pelaksanaan Ujian Keanggotaan PAI pada bulan Maret, Juni, dan November 2015



Ketua PAI memberikan presentasi pada Public Hearing RPMK Aktuaris



PAI mengadakan High Impact Training khusus bagi Aktuaris Perusahaan



PAI menjadi salah satu sponsor Indonesian Statistics Conference & Olympiad di IPB



PAI mengadakan Road Show ke 5 Universitas (ITS, ITB, UI, IPB, UGM)



PAI ikut menghadiri pada 19th East Asian Actuarial Conference di Bangkok



PAI memperkenalkan profesi aktuaris pada Canisius Education Fair



PAI turut serta dalam General Insurance Conference SAS di Singapore

ACTUARY BEYOND NUMBERS

Aktuaris selalu berhubungan dengan angka..? Tidak untuk Aktuaris satu ini, yang memiliki hobi memacu adrenalinnya. Dia adalah Budi Ramdani, FSAI yang telah berkecimpung 18 tahun di Aktuaria. Posisi terakhir saat ini sebagai Head of Actuarial Division dan Appointed Actuary dari PT Asuransi Jiwa BCA. Sejak sekolah, Budi menyenangi kegiatan alam bebas, dimulai dari camping, naik gunung, caving dan panjat tebing. Dan terakhir ini sepeda mountain bike yang lebih bergeser ke mencari sesuatu yang menantang adrenalin.

Hobi ini dimulai tahun 2011 saat bersepeda offroad atau "Mountain biking" (MTB) di Puncak, Bogor. Budi bergabung dalam komunitas besar sepeda Santa Cruz Indonesia (SCI) dan juga suka bermain MTB jenis Down Hill di Sentul City bike park, Cikole – Bandung, Sebex (arena untuk PON) di gunung pancar Sentul, dan Cihideung Gravity Park.

Selain bersepeda, Budi pun merakit sepedanya sendiri. Menurutnya, merakit sepeda itu seperti membuat sebuah produk, merangkai komponen-komponen yang terbaik dan sesuai dengan karakteristik dan jenis MTB. Sepeda yang baik akan meredam / menyerap shock atau bounce (pantulan) sehingga kedua roda tetap menempel di tanah, setelah drop atau melompat dari ketinggian.

Pengalaman berkesan ketika tersesat dan bermalam di hutan. Saat itu jalur yang ditempuh dari Ciwidey - Pantai Jayanti walaupun hanya sekitar 70 km, tetapi melewati bermacam-macam track seperti perkebunan teh, hutan pinus, jalan batu dan juga hutan yang lebat dimana kadang masih terlihat macam kumbang dan macan tutul. Kondisi saat itu musim hujan sehingga track menjadi berlumpur dengan kontur 40% turunan dan 60% tanjakan sehingga perkiraan gowes 12 jam akhirnya harus bermalam di hutan dan berakhir menjadi 36 jam lebih karena medan yang berat dan tidak terlihat di malam hari.

Budi pernah mengalami cedera saat mencoba track Cihideung Gravity Park. Meski menggunakan protector lengkap seperti elbow, knee, body suite protector, neck brace tetapi justru tangan kanan yang mengalami cedera patah yang akhirnya berujung tindakan operasi untuk pemasangan pen agar tulang bisa menyambung dan harus istirahat selama 6 bulan.

Banyak hal positif yang didapat oleh Budi dengan hobinya ini, selain menghilangkan kan stress dan rekreasi, networking, juga membantu mengencangkan otot dan meningkatkan daya tahan tubuh, Melancarkan sirkulasi darah, Membuang toxin/racun dalam tubuh dan dapat mencegah dan meredakan artritis, suatu bentuk peradangan pada persendian.



Jaminan Pensiun yang Merisaukan

oleh : Steven Tanner, FSAI

Aktuaris pada Dayamandiri Dharmakonsilindo

Seperti negara lain, Indonesia percaya negara wajib melindungi rakyatnya agar terhindar dari ketiadaan penghasilan pada usia lanjut. Untuk itu, tepatnya 1 Juli 2015, program Jaminan Pensiun (JP) sesuai amanat Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU-SJSN) akan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

UU-SJSN mengatur program JP diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti yang dibiayai dari iuran pemberi kerja dan pekerja. Rancangan program pensiun yang optimal adalah yang perolehan manfaat pensiunnya memadai (*adequate*), dapat bertahan untuk jangka waktu lama (*sustainable*), tidak memberatkan dan terjangkau (*affordable*), bersifat adil dan sama rata (*equitable*).

Tidak ada sistem yang cocok diterapkan pada semua negara, tetapi kita dapat memetik pelajaran dari pengalaman negara lain. Pengalaman ini menunjukkan dalam merancang sistem program pensiun yang optimal, ada 3 kebijakan utama yang harus diperhatikan: (1) besar manfaat pensiun beserta parameterinya; (2) usia pensiun dan rasio ketergantungan penduduk usia lanjut; dan (3) pembiayaan yang optimal secara sosial ekonomi.

Besar manfaat pensiun

Program JP menargetkan manfaat pensiun sebesar 1 persen dari penghasilan untuk setiap tahun masa kepesertaan dengan maksimum tingkat penghasilan pensiun (TPP) sebesar 40 persen. Ada yang menganggap besaran TPP ini sebagai tambahan dan lainnya sebagai bagian dari imbalan yang berasal dari sumber lain seperti JHT dan imbalan kerja yang diperoleh dari Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dasar penghasilan apa yang digunakan dalam menghitung manfaat pensiun? Penjelasan UU-SJSN menyebutnya sebagai penghasilan terakhir. Penggunaan penghasilan terakhir tidak sesuai dengan semangat program pensiun yang diselenggarakan secara nasional yang sifatnya *portable*, karena berpotensi mendorong terciptanya *moral hazard* dengan meningkatkan penghasilan seseorang sesaat atau beberapa saat sebelum pensiun dan promosi tidak pada tempatnya.

Banyak negara menggunakan rumusan *index career average* (ICA) dalam menghitung besar manfaat pensiun. Besar manfaat pensiun pada sistem ICA didasarkan pada penghasilan setiap periode masa kepesertaan, yang disesuaikan berdasarkan parameter ekonomi tertentu, misalnya rata-rata upah secara nasional. Manfaat pensiun yang diperoleh saat pensiun adalah penjumlahan setiap manfaat pensiun yang telah disesuaikan pada setiap periode masa kepesertaan itu. Penggunaan sistem ICA menghilangkan masalah keterkaitan antara iuran dan masa kepesertaan yang disebabkan oleh mobilitas perpindahan kerja dan kekosongan penghasilan dalam periode masa tunggu di antara periode mencari kerja yang sulit dikendalikan. Oleh karenanya, semua peserta diperlakukan secara adil dan sama rata (*equitable*) serta *moral hazard* dan risiko keuangan dapat dihindari.

Untuk mencapai sasaran keadilan, penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran dan manfaat pensiun perlu dibatasi. Penggunaan penghasilan terakhir dan yang tinggi menghasilkan subsidi silang dari kelompok pekerja yang peningkatan penghasilannya lambat (rendah) kepada

pekerja yang peningkatan penghasilannya pesat (tinggi), yang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Pada 2014, lebih kurang 90 persen pekerja formal di Indonesia berpenghasilan di antara upah minimum dan 2 kali PTKP, sehingga penggunaan batas maksimum penghasilan Rp 5 juta sebulan dan meningkat bertahap dianggap wajar sebagai sasaran pengentasan kemiskinan (*poverty relief*). Kelompok pekerja yang berpenghasilan tinggi dapat bergabung dengan program pensiun lain secara mandiri melalui penyelenggaraan yang sifatnya sukarela.

Usia pensiun

Beban jangka panjang dari suatu program pensiun dipengaruhi oleh rasio ketergantungan penduduk usia lanjut (RKPUL, *old-age dependency ratio*), sehingga sangat penting menetapkan usia pensiun yang wajar. Usia pensiun pada program JP harus diartikan sebagai usia saat peserta mulai berhak menerima manfaat pensiun, bukan usia peserta harus keluar dari angkatan kerja. RKPUL yang terus meningkat tidak hanya mempengaruhi keberlangsungan suatu program pensiun, tetapi juga produktifitas perekonomian secara keseluruhan. Usia harapan hidup manusia semakin tinggi dari tahun ke tahun di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Salah satu cara untuk mengendalikan beban penyelenggaraan program pensiun di masa mendatang adalah dengan meningkatkan usia pensiun. Usia pensiun yang ditetapkan saat ini relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Meningkatkan usia pensiun di kemudian hari dapat dilakukan dengan menetapkan suatu mekanisme yang secara otomatis meningkatkan usia pensiun secara bertahap seiring dengan peningkatan usia harapan hidup (*longevity*).

Skema peningkatan usia pensiun, misalnya 4 bulan setiap tahun dianggap cukup wajar. Usia pensiun di negara-negara yang perekonomiannya dianggap maju, status yang menjadi dambaan bangsa kita, sudah 65 dan bergerak ke 68 tahun. Dengan meningkatkan usia pensiun secara otomatis 4 bulan setahun dimulai dengan usia 56 pada 2015, usia pensiun 65 baru akan tercapai pada 2050.

Metode pembiayaan

Pembiayaan program pensiun dengan menghimpun dana tidak selalu dapat mengurangi beban jangka panjang. Apabila tingkat kenaikan penghasilan lebih tinggi dari tingkat hasil investasi, pendanaan justru meningkatkan beban. Beban suatu program pensiun ditentukan dari besar manfaat pensiun yang dijanjikan. Program pensiun yang diselenggarakan banyak negara lain umumnya tidak didanakan secara penuh (*fully funded*), melainkan *partial funding* bilamana perlu. Suatu program yang berorientasi pada sasaran pemerataan pendapatan dipandang sebagai program sosial yang justru memenuhi sasaran UU-SJSN.

Metode pembiayaan *pay as you go* (PAYG, "sambil jalan") yang juga digunakan oleh mayoritas negara lain tidak bergantung pada asumsi-asumsi jangka panjang, tetapi mengandalkan perubahan demografi yang pergerakannya lamban dan dapat diprediksi dengan akurasi yang handal. Metode PAYG diartikan sebagai pendanaan jangka pendek: program pensiun dibiayai hanya untuk membayar manfaat pensiun yang jatuh tempo pada periode tertentu (setahun atau beberapa tahun) saja. Akumulasi dana dalam metode PAYG, apabila ada, nilainya relatif kecil sehingga dapat mengurangi berbagai risikosepeti pasar keuangan, investasi, *mismatch*, kebocoran, dan kesalahan pengelolaan.

Dengan adanya pembatasan masa iuran 15 tahun sebelum berhak memperoleh manfaat pensiun berkala dan memperhatikan kondisi Indonesia saat ini, penetapan iuran yang relatif rendah, dimulai dengan 1-2 persen dan meningkat secara bertahap menjadi 3 persen pada 2030 dan mencapai 4-5 persen pada 2050, sudah cukup memadai untuk membiayai program JP sekaligus membangun *contingency fund*.

Strategi penetapan iuran yang rendah dan berjenjang dipandang sangat realistis dan dapat mengurangi tekanan terhadap dunia usaha yang sudah terbebani dengan masalah iuran jaminan kesehatan dan iuran wajib lainnya yang tidak kecil serta dapat meningkatkan daya saing dan memberi ruang yang lebih luas dalam pengalokasian sumber daya yang ada untuk memperkuat kinerja perekonomian nasional.

Memang betul apabila iuran di awal rendah, maka iuran di kemudian hari akan tinggi. Dapatkah beban program JP dikendalikan? Jawabannya, dapat! Dengan RKPUL (60 tahun) di Indonesia saat ini (2015) sebesar 15,7 persen (*UN World Population Prospects: The 2012 Revision*), iuran untuk TPP 40 persen hanya 6,28 persen (40 kali 15,7). Beban sebenarnya tentu bervariasi tergantung jumlah peserta dalam program JP dan perubahan demografi. Untuk menjaga stabilitas RKPUL pada kisaran 20 persen, usia pensiun perlu dinaikkan minimal 65 tahun sebelum 2050.

Iuran program JP tidak harus sama antar generasi dan pemahaman *intergenerational equity* jangan dibatasi hanya pada program pensiun saja. Tidak salah generasi mendatang membayar lebih, karena mereka mewarisi banyak hal yang dibangun oleh generasi sebelumnya, misalnya infrastruktur, sekolah, rumah sakit, teknologi. Iuran yang meningkat di masa depan justru dapat dengan mudah diserap seiring pertumbuhan PDB per kapita. Rancangan program JP yang diuraikan di atas memberikan perlindungan kepada pekerja dengan beban yang efisien dan adil serta terhindar dari risiko yang tidak perlu.

Hasil edit, artikel aslinya telah dimuat pada Majalah Tempo edisi 12 April 2015.

Tentang Persatuan Aktuaris Indonesia

Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), atau disebut *The Society of Actuaries of Indonesia* (SAI), didirikan di Jakarta, 19 Oktober 1964. PAI merupakan organisasi profesi aktuaris di Indonesia dan telah menjadi anggota penuh *the International Actuarial Association* (IAA) sejak tahun 2006.

Kepengurusan Organisasi dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dimana Ketua Organisasi dipilih melalui Rapat Anggota. Peranan organisasi profesi aktuaris, PAI adalah sebagai berikut:

- 1) mewakili dan mengatur anggota PAI untuk kepentingan profesi dan kepentingan umum;
- 2) mengatur standar praktek dan kode etik yang meliputi etika dan hal-hal teknis;
- 3) menyelenggarakan ujian keanggotaan PAI berdasarkan kurikulum yang sesuai dengan IAA dan mengeluarkan sertifikasi;
- 4) mengembangkan dan memelihara kemitraan dengan universitas lokal untuk identifikasi optimal talenta muda dan pengembangan anggota baru;
- 5) menyelenggarakan seminar dan lokakarya untuk keberlanjutan pendidikan dan pengembangan profesionalisme anggota; dan
- 6) membangun dan memelihara hubungan kerjasama dengan Pemerintah, komunitas bisnis, dan profesi lainnya.

Disklaimer

Seputar Aktuaris diterbitkan oleh PAI untuk anggota PAI. Publikasi ini bertujuan pada pendidikan dan disediakan untuk informasi kegiatan PAI selama periode 2014-2017. Publikasi ini bukan merupakan nasihat profesional atau keuangan. Pernyataan fakta dan pendapat yang dikemukakan adalah pendapat masing-masing penulis. PAI tidak bertanggung jawab atas tuntutan atau kerugian sehubungan dengan akurasi informasi dan penggunaan atau penyalahgunaan setiap informasi yang tersedia serta kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pengiriman publikasi ini melalui email atau website, termasuk kerugian yang diakibatkan oleh virus.

Hak Cipta ©2015 PAI. Semua hak terdaftar dan dilindungi.

Editor Team : Ponno J, Meylina S, Panny D, Usti N, Citra K ; Desain Grafis : Masyhar HW

Kirimkan artikel anda dan dapatkan reward untuk setiap artikel yang terpilih

PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA
(The Society of Actuaries of Indonesia)

Jl. Tebet Raya No.66 C

Jakarta Selatan 12820

Indonesia

Telp. +62-21 835 5105

Fax +62-21 3650 5600

E-mail secretariat@aktuaris.org

Twitter @AktuarisPAI

Website www.aktuaris.org

Untuk informasi lebih lanjut mengenai

Seputar Aktuaris, silakan hubungi staf

Sekretariat PAI:

Nancy Saskiawati

(nancymangkoedipoero@aktuaris.or.id)

Dwi Yudianto

(dwi.yudianto@aktuaris.or.id)